

MENGGALI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM SUKARNO: LANDASAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA DAN RELEVANSINYA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Oleh :

Robert Mubarrod¹⁾, Nur Rizki Eka Putra²⁾

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Bung Karno

¹email: tarrodbert@gmail.com

²email: nurrizki2223344@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 19 Februari 2025

Revisi, 23 April 2025

Diterima, 14 Mei 2025

Publish, 15 Mei 2025

Kata Kunci :

Pemikiran Islam Soekarno,
Karakter *Building*,
Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.



ABSTRAK

Artikel ini mengeksplorasi pemikiran politik Islam Sukarno dan relevansinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sukarno, sebagai salah satu tokoh pendiri bangsa dan Presiden pertama Indonesia, memiliki pandangan yang unik dan integratif mengenai peran Islam dalam politik. Ia memandang Islam bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai ideologi yang dapat berkontribusi pada pembangunan nasional dan pembentukan identitas kebangsaan. Dengan pendekatan historis dan analitis, artikel ini menelusuri bagaimana Sukarno memadukan prinsip-prinsip Islam dengan konsep kebangsaan dan kenegaraan. Selain itu, artikel ini juga menilai relevansi pemikiran Sukarno dalam konteks modern Indonesia, di mana isu-isu seperti pluralisme, demokrasi, dan toleransi beragama terus menjadi tantangan utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemikiran politik Islam Sukarno masih memiliki nilai signifikan dalam upaya memperkuat kesatuan nasional dan membangun sistem politik yang inklusif dan berkeadilan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Robert Mubarrod

Afiliasi: Universitas Bung Karno

Email: tarrodbert@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pemikiran politik Islam Sukarno merupakan bagian penting dari warisan intelektual dan ideologis yang membentuk fondasi Republik Indonesia. Sebagai salah satu bapak pendiri bangsa, Sukarno tidak hanya berperan dalam perjuangan kemerdekaan, tetapi juga dalam merumuskan visi tentang bagaimana negara Indonesia seharusnya diatur dan dikelola (Hidayat, 2012). Dalam pandangannya, Islam memiliki potensi besar sebagai kekuatan ideologis yang dapat mendorong pembangunan nasional dan memperkuat identitas kebangsaan.

Sukarno mengadopsi pendekatan yang integratif, melihat Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sumber nilai dan prinsip yang relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Karim, 2013). Ia menggabungkan ajaran-ajaran Islam dengan prinsip-prinsip kebangsaan dan sosialisme, yang kemudian dikenal dengan konsep

Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Konsep ini bertujuan untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat Indonesia yang beragam dalam satu visi yang koheren dan inklusif (Ali, 2015).

Sukarno menganggap Islam sebagai lebih dari sekadar agama; ia melihatnya sebagai sumber nilai dan prinsip yang dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa Islam memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembentukan identitas nasional serta dalam memberikan arah bagi pembangunan ekonomi dan sosial (Yusuf, 2014). Dengan demikian, Islam dipandang sebagai elemen penting yang dapat menyatukan masyarakat yang beragam dalam visi bersama tentang Indonesia yang maju dan berkeadilan.

Konsep Nasakom yang dirumuskan oleh Sukarno adalah salah satu upayanya untuk menciptakan integrasi antara berbagai elemen

masyarakat Indonesia. Nasionalisme, agama (Islam), dan komunisme dianggap sebagai tiga pilar utama yang dapat menyatukan bangsa Indonesia yang beragam. Melalui konsep ini, Sukarno berharap dapat menciptakan suatu masyarakat yang inklusif, di mana setiap kelompok memiliki peran dan kontribusi dalam pembangunan nasional (Ali, 2015). Konsep ini juga mencerminkan upaya Sukarno untuk menemukan jalan tengah antara berbagai ideologi yang ada, serta untuk menciptakan stabilitas politik dan sosial.

Pendekatan historis dan analitis terhadap pemikiran politik Islam Sukarno menunjukkan bagaimana ia berhasil memadukan elemen-elemen tradisional dan modern dalam satu kerangka yang dinamis. Sukarno berpendapat bahwa Islam memiliki peran penting dalam membentuk identitas nasional dan moral bangsa, serta dalam memberikan arah bagi pembangunan ekonomi dan sosial (Yusuf, 2014). Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara kepercayaan religius dan aspirasi nasionalistik, yang penting bagi kestabilan dan kemajuan negara.

Sukarno juga berupaya untuk menghubungkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip modern seperti demokrasi dan keadilan sosial. Ia percaya bahwa Islam dapat memberikan landasan moral yang kuat bagi pembangunan negara, sekaligus memperkuat identitas nasional Indonesia. Dengan demikian, pemikiran politik Islam Sukarno tidak hanya relevan pada masanya, tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam konteks modern. Namun, relevansi pemikiran Sukarno dalam konteks modern Indonesia masih menjadi topik yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Dalam era demokrasi dan globalisasi, isu-isu seperti pluralisme, demokrasi, dan toleransi beragama terus menjadi tantangan utama (Azra, 2010). Artikel ini bertujuan untuk menilai bagaimana prinsip-prinsip yang diajukan oleh Sukarno dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer ini.

Indonesia menghadapi berbagai tantangan terkait dengan pluralisme dan demokrasi. Sebagai negara dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya yang tinggi, Indonesia perlu menemukan cara untuk mengelola perbedaan ini secara konstruktif. Pemikiran politik Islam Sukarno, dengan penekanannya pada inklusivitas dan persatuan, dapat memberikan wawasan berharga dalam menghadapi tantangan ini. Sukarno percaya bahwa Islam dapat berperan dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi dan pluralisme. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif dan menghormati perbedaan, Islam dapat menjadi kekuatan yang mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan demokratis. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip yang diajukan oleh Sukarno dapat menjadi panduan bagi upaya untuk menciptakan sistem politik yang inklusif dan berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi literatur, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, makalah konferensi, laporan penelitian, dan dokumen resmi lainnya. Langkah pertama dalam studi literatur ini adalah mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian, seperti karya-karya tulis Sukarno, buku tentang pemikiran politik Sukarno, artikel jurnal yang membahas teori-teori politik Islam Sukarno, dan laporan penelitian terkait. Literatur yang dikumpulkan kemudian dievaluasi dan diseleksi berdasarkan kualitas dan relevansi, memastikan bahwa hanya sumber-sumber yang kredibel dan relevan yang digunakan (Creswell, 2014). Selanjutnya, literatur yang dipilih diorganisasikan berdasarkan tema atau sub-topik yang relevan, seperti pemikiran politik Islam Sukarno, teori integrasi sosial, dan relevansi pemikiran Sukarno dalam konteks modern. Proses pengorganisasian ini membantu dalam mengidentifikasi pola dan hubungan antara berbagai sumber literatur (Ridley, 2012). Langkah selanjutnya adalah analisis literatur yang telah diorganisasikan, mengidentifikasi tema utama, argumen kunci, dan bukti yang mendukung pemikiran Sukarno, serta melakukan perbandingan dan kontras antara berbagai sumber untuk menemukan kesamaan dan perbedaan dalam pandangan dan interpretasi (Bowen, 2009).

Langkah terakhir adalah penulisan sintesis yang menggabungkan dan menginterpretasikan hasil analisis literatur untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam konteks ini, sintesis akan menyajikan pemikiran politik Islam Sukarno, mengkaji relevansinya dalam konteks modern Indonesia, dan mengidentifikasi implikasi dari pemikiran ini bagi pembangunan bangsa dan negara (Hart, 1998). Studi literatur ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang pemikiran Sukarno dan kontribusinya terhadap pembangunan bangsa serta relevansinya dalam menghadapi tantangan pluralisme, demokrasi, dan toleransi beragama di Indonesia (Karim, 2013; Azra, 2010; Yusuf, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Politik Islam Sukarno: Integrasi Sosial dan Nasakom

Pemikiran politik Islam Sukarno mencerminkan upaya integratif untuk menyatukan berbagai elemen ideologis dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Sukarno melihat Islam sebagai kekuatan ideologis yang signifikan, tidak hanya sebagai agama tetapi juga sebagai sistem nilai yang dapat memberikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu konsep penting yang dikemukakan oleh Sukarno adalah Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Nasakom adalah pendekatan yang digunakan Sukarno untuk

menyatukan berbagai elemen ideologis di Indonesia, yaitu nasionalisme, agama (Islam), dan komunisme. Sukarno percaya bahwa dengan menyatukan ketiga elemen ini, Indonesia dapat mencapai stabilitas politik dan sosial. Dalam pandangannya, nasionalisme memberikan landasan kebangsaan, agama memberikan landasan moral dan spiritual, sementara komunisme memberikan landasan sosial ekonomi (Ali, 2015).

Menurut Sukarno, Islam memiliki peran penting dalam membentuk identitas nasional dan moral bangsa. Islam, dengan ajaran-ajarannya tentang keadilan, persatuan, dan kebersamaan, dianggap mampu menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan bangsa. Sukarno juga melihat Islam sebagai kekuatan yang dapat memperkuat nasionalisme Indonesia. Dalam pidatonya, Sukarno sering menekankan bahwa Islam dan nasionalisme tidak perlu dipertentangkan, melainkan dapat saling melengkapi untuk membangun negara yang kuat dan bersatu (Karim, 2013). Sukarno mengadopsi pendekatan yang integratif dalam melihat Islam, yaitu sebagai agama dan juga sebagai sumber nilai yang relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pandangannya, ajaran-ajaran Islam dapat digabungkan dengan prinsip-prinsip kebangsaan dan sosialisme untuk membentuk suatu sistem politik yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini terlihat dalam upaya Sukarno untuk mengintegrasikan ajaran-ajaran Islam dengan ideologi nasionalisme dan sosialisme dalam konsep Nasakom (Hidayat, 2012). Dalam banyak pidatonya, Sukarno menekankan pentingnya nilai-nilai Islam seperti keadilan sosial, persaudaraan, dan solidaritas dalam membangun bangsa. Ia percaya bahwa nilai-nilai ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, Sukarno juga berpendapat bahwa Islam memiliki potensi besar sebagai kekuatan ideologis yang dapat mendorong pembangunan nasional dan memperkuat identitas kebangsaan (Yusuf, 2014). Relevansi pemikiran politik Islam Sukarno masih sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti pluralisme, demokrasi, dan toleransi beragama. Sukarno menekankan pentingnya inklusivitas dan persatuan dalam masyarakat yang majemuk. Prinsip-prinsip ini masih sangat relevan dalam konteks modern, di mana Indonesia terus menghadapi tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman (Azra, 2010). Salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah bagaimana menjaga pluralisme dan toleransi beragama. Dalam hal ini, pemikiran politik Islam Sukarno yang menekankan pentingnya persatuan dan inklusivitas dapat menjadi panduan yang berharga. Sukarno percaya bahwa Islam dapat berperan sebagai kekuatan pemersatu yang menghubungkan berbagai elemen masyarakat Indonesia. Dengan menekankan pentingnya persatuan dan kerjasamanya, Islam dapat

memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan masyarakat yang stabil dan harmonis (Yusuf, 2014). Pemikiran Sukarno tentang pluralisme juga terlihat dalam upayanya untuk mempromosikan toleransi beragama. Sukarno sering menekankan bahwa Islam mengajarkan toleransi dan menghormati perbedaan. Ia berpendapat bahwa nilai-nilai Islam tentang toleransi dapat membantu menciptakan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman agama. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks modern, di mana isu-isu seperti intoleransi dan radikalisme masih menjadi tantangan utama (Azra, 2010).

Implementasi dan Relevansi Pemikiran Politik Islam Soekarno dengan Kehidupan Indonesia Modern

Pemikiran politik Islam Sukarno juga memiliki relevansi dalam konteks demokrasi dan keadilan sosial. Sukarno percaya bahwa demokrasi adalah sistem yang paling sesuai untuk Indonesia, karena dapat memberikan ruang bagi partisipasi semua elemen masyarakat. Ia juga berpendapat bahwa demokrasi harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial, yang merupakan salah satu nilai inti dalam ajaran Islam (Karim, 2013). Dalam pandangan Sukarno, keadilan sosial adalah prasyarat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Ia sering menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir orang. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks modern, di mana ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Sukarno percaya bahwa dengan menggabungkan nilai-nilai Islam tentang keadilan sosial dengan prinsip-prinsip demokrasi, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang lebih adil dan merata (Hidayat, 2012).

Sukarno juga menekankan pentingnya menciptakan sistem politik yang inklusif dan berkeadilan. Dalam pandangannya, inklusivitas adalah kunci untuk menjaga persatuan dan stabilitas dalam masyarakat yang majemuk. Ia percaya bahwa semua elemen masyarakat, termasuk minoritas, harus diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Prinsip inklusivitas ini sangat relevan dalam konteks modern, di mana isu-isu seperti diskriminasi dan marginalisasi masih menjadi tantangan utama (Ali, 2015). Selain itu, Sukarno juga menekankan pentingnya keadilan dalam sistem politik. Ia percaya bahwa keadilan adalah salah satu nilai inti dalam ajaran Islam, dan harus menjadi dasar dalam semua kebijakan dan tindakan pemerintah. Sukarno sering menekankan bahwa pemerintah harus berupaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih kesejahteraan. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks modern, di mana ketidakadilan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah yang perlu diatasi (Yusuf, 2014).

Pemikiran politik Islam Sukarno juga tercermin dalam berbagai kebijakan publik yang diimplementasikannya selama masa pemerintahannya. Misalnya, Sukarno mendorong penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam kebijakan ekonomi dan sosial. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam mengatur perekonomian untuk memastikan bahwa kekayaan negara didistribusikan secara adil dan merata. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks modern, di mana ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan utama (Karim, 2013). Selain itu, Sukarno juga menekankan pentingnya pendidikan dalam pembangunan bangsa. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing. Sukarno berpendapat bahwa pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai Islam, seperti keadilan, persaudaraan, dan solidaritas. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam konteks modern, di mana pendidikan masih menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Hidayat, 2012).

Pemikiran politik Islam Sukarno juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan kesatuan nasional. Sukarno percaya bahwa persatuan adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan kemajuan negara. Dalam pandangannya, Islam dapat berperan sebagai kekuatan pemersatu yang menghubungkan berbagai elemen masyarakat Indonesia. Dengan menekankan pentingnya persatuan dan kerjasama, Islam dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan masyarakat yang stabil dan harmonis (Yusuf, 2014). Sukarno sering menekankan bahwa persatuan adalah salah satu nilai inti dalam ajaran Islam. Ia berpendapat bahwa Islam mengajarkan pentingnya persatuan dan solidaritas di antara sesama umat manusia. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam konteks modern, di mana isu-isu seperti perpecahan dan konflik masih menjadi tantangan utama. Dengan menekankan pentingnya persatuan dan kerjasama, pemikiran politik Islam Sukarno dapat memberikan panduan yang berharga dalam menghadapi tantangan-tantangan ini (Azra, 2010).

4. KESIMPULAN

Pemikiran politik Islam Sukarno memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Dengan menekankan pentingnya nilai-nilai Islam seperti keadilan sosial, persatuan, dan solidaritas, Sukarno berhasil menciptakan suatu visi yang inklusif dan berkeadilan bagi pembangunan bangsa. Relevansi pemikiran Sukarno dalam konteks modern masih sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti pluralisme, demokrasi, dan toleransi beragama. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut mengenai pemikiran politik Islam Sukarno diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai kontribusi pemikiran ini terhadap

penguatan kesatuan nasional dan pembangunan sistem politik yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini penting bagi kelanjutan pembangunan dan stabilitas Indonesia di masa depan.

5. REFERENSI

- Ali, Abdullah. (2015). Nasakom dan Integrasi Sosial dalam Pemikiran Sukarno. Bandung: Mizan.
- Azra, A. (2010). Demokrasi, Pluralisme, dan Toleransi Beragama di Indonesia. Jakarta: Kompas. (2015). Nasakom: Ideologi Politik Sukarno. Bandung: Mizan.
- Amalia, S. (2016). Peran Islam dalam Politik Sukarno dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Pustaka Ilmu.
- Basri, F. (2018). Sukarno dan Pancasila: Konstruksi Ideologis dan Implementasinya. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Harahap, M. (2019). Politik Kebangsaan dan Agama dalam Pandangan Sukarno. Medan: Penerbit Bumi Aksara.
- Hidayat, R. (2012). Pemikiran Politik Islam Sukarno. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, A. (2013). Islam dan Nasionalisme dalam Pemikiran Sukarno. Yogyakarta: LKiS.
- Mulyadi, T. (2017). Sukarno: Antara Nasionalisme, Agama, dan Sosialisme. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Nuridin, R. (2020). Sukarno dan Pembentukan Identitas Nasional Indonesia. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Purnomo, S. (2015). Konsep Negara Kesatuan dan Implementasinya dalam Pemerintahan Sukarno. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ramadhan, A. (2016). Kebijakan Politik Sukarno dan Dampaknya pada Sosial Ekonomi. Jakarta: LP3ES.
- Sari, N. (2018). Implementasi Konsep Nasakom dalam Pembangunan Indonesia pada Era Sukarno. Jakarta: Penerbit Pustaka Agung.
- Sihombing, E. (2017). Sukarno dan Strategi Politik Ekonomi dalam Konteks Nasionalisme dan Islam. Jakarta: Penerbit Mitra Cendikia.
- Widianto, A. (2021). Pemikiran Politik Sukarno dalam Konteks Kontemporer. Surabaya: Penerbit Cahaya Baru.
- Yusuf, M. (2014). Islam dan Pembangunan Nasional: Perspektif Sukarno. Malang: UMM Press.
- Stroebe, M., Vliet, T., Hewstone, M., & Willis, H. (2002). Homesickness among student in two cultures: Antecedents and consequences. British Journal of Psychology, 148 - 168.
- Sugiono. (2008). Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Yasmin, M. (2018). Pengaruh Locus of Control dan Dukungan Sosial Teman Sebaya Terhadap Homesickness pada Remaja di Lingkungan Pesantren. 5-6.

Yasmin, M., Zulkarnain, & Daulay. (2017).
Gambaran Homesickness Pada Siswa Baru di
Lingkungan Pesantren. Jurnal Pemikiran dan
Penelitian Psikologi, 170.